

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Menurut Pramono (2014) otonomi daerah adalah “wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.” Menurut Syurmita (2014) pelaksanaan otonomi daerah dapat memberi pengaruh pada masyarakat dalam berbagai bidang. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerah masing-masing.

2.1.2 Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan “laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.” Tujuan laporan keuangan terdiri dari tujuan umum dan tujuan spesifik. Tujuan umum laporan keuangan adalah Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara menyediakan

Informasi-informasi yang meliputi:

1. Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Perubahan posisi sumber daya ekonomi, dan ekuitas pemerintah;
3. Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Ketersediaan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang berisikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan.

2.1.2.2 Komponen Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pokok terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang disajikan pada LRA sekurang-kurangnya antara lain pendapatan- LRA, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Anggaran dan realisasinya harus diperbandingkan pada LRA dalam satu periode pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan/pembukuan tahun sebelumnya, dan lain-lain, serta saldo anggaran lebih akhir.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan,

investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan pos-pos pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional (bila ada), surplus/defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama kas selama satu periode akuntansi, dan saldo akhir kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal; surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang Antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; serta ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK mengungkapkan hal-hal mengenai informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya, rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan, informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, dan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Berdasarkan pengertian dapat disimpulkan bahwa komponen – komponen pada laporan keuangan pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.3 *Financial Distress*

Menurut Hanafi (2014) *financial distress* dapat digambarkan dari dua titik ekstrim yaitu daripada likuiditas jangka pendek sampai *insolvable* (utang lebih besar daripada aset)

kesulitan keuangan jangka pendek biasanya bersifat sementara, tetapi bisa berkembang menjadi lebih buruk. Menurut Tubeles (2015) *financial distress* merupakan ketidakmampuan organisasi dalam mencapai tujuannya dikarenakan banyaknya hambatan, atau ketidakmampuan dalam memenuhi pelayanan. Pada sektor pemerintahan, *financial distress* merupakan ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan pada publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan pemerintah ini karena pemerintah tidak mempunyai ketersediaan dana untuk diinvestasikan pada infrastruktur yang digunakan dalam penyediaan pelayanan pada publik tersebut. Salah satu standar mutu pelayanan ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah adalah alokasi belanja modal. Menurut Mahmudi (2016) status *financial distress* dalam sektor pemerintahan diproyeksikan dengan rasio belanja modal terhadap total belanja. Sehingga dapat diketahui bahwa dalam menentukan status *financial distress* didapatkan dengan perbandingan antara realisasi belanja modal dan total belanja daerah yang bersangkutan.

Menurut Syurmita (2014) bahwa pada pemerintah daerah, *financial distress* ditandai dengan tidak terkendalinya pengeluaran yang dilakukan untuk belanja rutin, sehingga pemerintah daerah menekan pengeluaran untuk belanja modal atau belanja investasi. Maka dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab *financial distress* adalah misalokasi belanja modal yang disebabkan oleh tidak terkendalinya pengeluaran pemerintah.

2.1.4 Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 belanja modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Sehubungan dengan *financial distress* pemerintah daerah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan pada publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Kemampuan yang dimaksud di dalam definisi tersebut, dapat diindikasikan dengan belanja modal sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, bahwa porsi belanja modal yang ditetapkan adalah sebesar 30% . Bagi pemerintah daerah yang tidak mampu mencapai target belanja modal tersebut dapat dinyatakan dalam status *financial distress*, dimana seharusnya belanja modal dapat lebih dioptimalkan dalam menyediakan pelayanan publik yang maksimal. Dibandingkan dengan belanja modal, banyak daerah yang lebih menghabiskan anggarannya untuk belanja pegawai bahkan bisa mencapai 70% dari total belanja daerah.

2.1.5 Rasio Keuangan

Subramanyam dan Wild (2013) menyatakan bahwa rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio. Rasio keuangan adalah alat yang paling sering digunakan dalam menganalisis keuangan. Ritonga et al. (2012) menggunakan enam dimensi rasio keuangan diantaranya *short term solvency ratio*, *long term solvency ratio*, *budgetary solvency ratio*, *financial flexibility ratio*, dan *financial independence ratio*. Mahmudi (2016) menggunakan lima macam rasio keuangan untuk menilai kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia, salah satunya adalah rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

2.1.5.1 Rasio Efektivitas

Menurut Kawatu (2019) rasio efektivitas dalam sektor pemerintahan menunjukkan kemampuan daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang di targetkan. Sedangkan menurut Halim (2012) rasio efektivitas memberikan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerahnya dan realisasi pendapatan daerah

dibandingkan dengan target pendapatan yang harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Rasio efektivitas dirumuskan dengan:

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}}$$

Sumber: Kawatu (2019)

2.1.5.2 Rasio Solvabilitas

Menurut Fitra (2019) rasio solvabilitas adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas menunjukkan besarnya aset pemerintah daerah untuk mendanai semua utang yang ditanggung. Rasio solvabilitas dirumuskan dengan:

$$\frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Utang}}$$

Sumber: Fitra (2019)

2.1.5.3 *Budgetary Solvency Ratio*

Menurut Ritonga, Clark, dan Wickremasinghe (2012) *budgetary solvency ratio* digunakan untuk mengukur perbandingan antara total pendapatan yang ada dengan total belanja yang harus dikeluarkan. *Budgetary solvency ratio* dirumuskan dengan:

$$\frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Belanja}}$$

Sumber: Ritonga, dkk (2012)

2.1.5.4 *Financial Flexibility Ratio*

Menurut Ritonga, Clark, dan Wickremasinghe (2012) *financial flexibility ratio* digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan, meningkatkan komitmen, baik dalam meningkatkan kapasitas utang. *Financial flexibility ratio* dirumuskan dengan:

$$\frac{(\text{Total Pendapatan} - \text{Dana Alokasi Khusus})}{\text{Total Kewajiban}}$$

Sumber: Ritonga, dkk (2012)

2.1.5.5 *Financial Independence Ratio*

Menurut Ritonga, Clark, dan Wickremasinghe (2012) *financial independence ratio* digunakan untuk menggambarkan proporsi pendapatan asli daerah dari total pendapatan daerah. *Financial independence ratio* dirumuskan dengan:

$$\frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Sumber: Ritonga, dkk (2012)

2.1.6 Rasio Keuangan pada Belanja

Menurut Mahmudi (2016) rasio keuangan pada belanja terdiri dari:

1. Analisis Belanja per Fungsi Terhadap Total Belanja
 Analisis belanja per fungsi terhadap total belanja dihitung dengan cara membandingkan belanja tiap-tiap fungsi terhadap total belanja dalam APBD. Rasio belanja per fungsi memiliki sembilan fungsi yang meliputi:
 - Pelayanan Umum Pemerintahan
 - Ketertiban dan Keamanan
 - Ekonomi
 - Lingkungan Hidup
 - Perumahan dan Fasilitas Umum
 - Kesehatan
 - Pariwisata dan Budaya
 - Pendidikan
 - Perlindungan Sosial.

Rasio Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Fungsi ...}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Sumber: Mahmudi (2016)

2. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja
 Analisis Belanja operasi terhadap Total Belanja merupakan perbandingan Antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Pada

umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90 persen. Rasio belanja operasi terhadap total belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Sumber: Mahmudi (2016)

3. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Sumber: Mahmudi (2016)

Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan pada belanja terdiri dari analisis belanja per fungsi terhadap total belanja, analisis belanja operasi terhadap total belanja, dan analisis belanja modal terhadap total belanja.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rida Damai Yanti	2018	Kemampuan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Periode 2012- 2016	1. Nilai <i>short term solvency ratio</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>financial distress</i> pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. 2. Nilai <i>long term solvency ratio</i> tidak berpengaruh

				<p>signifikan terhadap <i>financial distress</i> pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat</p> <p>3. Nilai <i>budgetary solvency ratio</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i> pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat</p> <p>4. Nilai <i>financial flexibility ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i> pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat</p> <p>5. Nilai <i>financial independence ratio</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>financial distress</i> pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.</p>
2	Yoli Wulandari Fefri Indra Arza	2020	Pengaruh Faktor Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Financial Distress	<p>1. Rasio efektivitas berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</p> <p>2. Rasio efisiensi berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</p> <p>3. Rasio pertumbuhan berpengaruh tidak</p>

				<p>signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</p> <p>4. Kemandirian keuangan berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</p> <p>5. Jumlah penduduk berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</p> <p>6. Luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</p> <p>7. Opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</p>
3	Dewi Sartika	2016	Analisis Prediksi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Periode 2011-2013	<p>1. Kemandirian keuangan berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p> <p>2. Desentralisasi tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p> <p>3. Solvabilitas berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>.</p>
4	Mutiara Galuh Pratiwi	2018	Prediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2014	<p>1. Kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>.</p> <p>2. Derajat desantralisasi keuangan tidak berpengaruh</p>

				<p>terhadap <i>financial distress</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>. 4. Populasi penduduk tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>. 5. Umur pemerintah berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>.
5	Rury Windiyanti Eliya Isfaatun	2016	Pengaruh Kemandirian Keuangan, Rasio Solvabilitas, Kompleksitas, Dan Umur Pemerintahan Terhadap Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>. 2. Rasio solvabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>. 3. Kompleksitas tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>. 4. Umur pemerintahan berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>.
6	Khoirul Fariz Atmaja	2012	Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Kemungkinan Financial Distress	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara simultan, Variabel rasio kinerja keuangan, rasio posisi keuangan, rasio efisiensi keuangan, dan rasio hutang keuangan berpengaruh terhadap prediksi kondisi <i>financial distress</i>.

				<ol style="list-style-type: none"> 2. Variabel rasio kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap prediksi kondisi <i>financial distress</i>. 3. Variabel rasio posisi keuangan berpengaruh negatif terhadap prediksi kondisi <i>financial distress</i>. 4. Variabel rasio efisiensi keuangan berpengaruh negatif terhadap prediksi kondisi <i>financial distress</i>. 5. Variabel rasio hutang keuangan berpengaruh positif terhadap prediksi kondisi <i>financial distress</i>.
7	Yuli Fitriana	2017	Analisis Rasio Keuangan Sebagai Prediksi <i>Financial Distress</i> (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia Tahun 2013-2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap prediksi <i>financial distress</i> 2. Rasio posisi keuangan berpengaruh negatif terhadap prediksi <i>financial distress</i> 3. Rasio solvabilitas berpengaruh negatif terhadap prediksi <i>financial distress</i> 4. Rasio kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap

				prediksi <i>financial distress</i>
8	Syurmita	2014	Prediksi <i>Financial Distress</i> Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemandirian Keuangan berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i> 2. Derajat Desentralisasi berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> 3. Rasio Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> 4. Kompleksitas berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i> 5. Pemekaran Wilayah berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i>.
9	Mutiara Sari Fefri Indra Arza	2019	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kondisi <i>Financial Distress</i> Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Se-Indonesia Periode 2015-2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemandirian keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>financial distress</i>. 2. Derajat desentralisasi berpengaruh

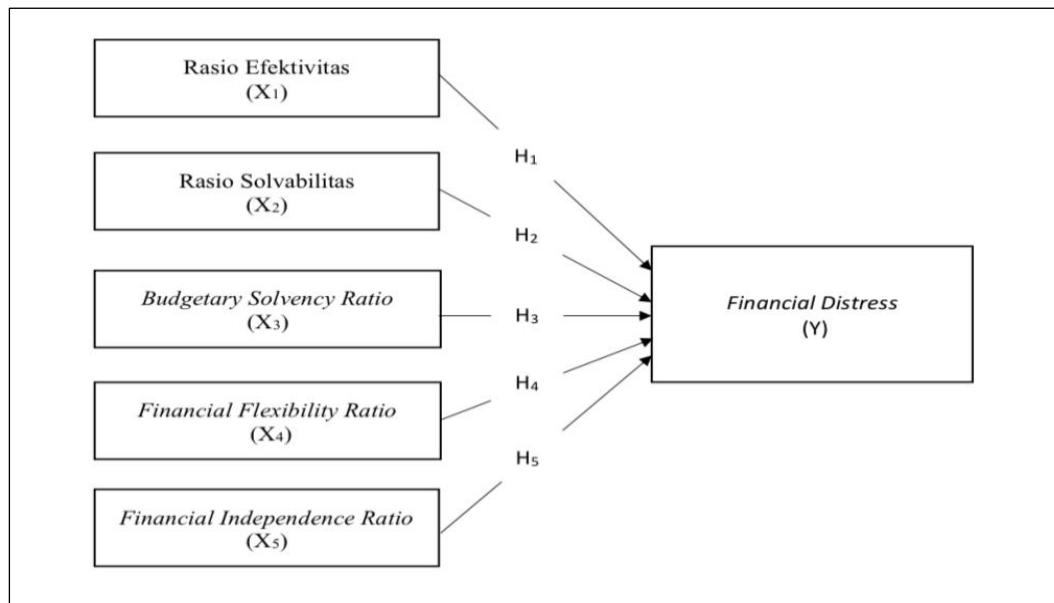
				<p>negatif dan signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</p> <p>3. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</p> <p>4. Luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</p>
10	Dedi Rusdi Khoirul Fuad	2018	Metode Prediksi <i>Financial Distress</i> Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Untuk Mengukur Kesejahteraan Ummat	<p>1. Kemandirian keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</p> <p>2. Keselarasan belanja tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</p> <p>3. Pertumbuhan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i>.</p>

Sumber : Penelitian Terdahulu, data yang diolah (2021)

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengembangkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Data diolah (2021)

2.4 Hipotesis

2.4.1 Hubungan Rasio Efektivitas terhadap Prediksi *Financial Distress*

Menurut Mardiasmo (2013) rasio efektivitas memberikan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerahnya dan realisasi pendapatan daerah dibandingkan dengan target pendapatan yang harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas yang diperoleh oleh pemerintah daerah menandakan bahwa kemampuan daerah sudah baik. Hal ini ditunjukkan pada persentase realisasi pendapatan dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang telah ditentukan sebelumnya sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan baik dan cenderung terhindar dari indikasi *financial distress*. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Rasio Efektivitas berpengaruh terhadap prediksi *financial distress* pemerintah daerah.

2.4.2 Hubungan Rasio Solvabilitas terhadap prediksi *Financial Distress*

Syurmita (2014) pada penelitiannya menyatakan bahwa dalam bidang sektor publik, rasio solvabilitas ditandai dengan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Hal ini berkaitan dengan semakin tinggi kemampuan daerah dalam memenuhi kewajibannya, maka pemerintah daerah akan cenderung terhindar dari indikasi *financial distress*. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Rasio Solvabilitas berpengaruh terhadap prediksi *financial distress* pemerintah daerah.

2.4.3 Hubungan *Budgetary Solvency Ratio* terhadap prediksi *Financial Distress*

Ritonga et al. (2012) menyatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara total pendapatan yang ada dengan total belanja yang harus dikeluarkan. Semakin tinggi nilai dari rasio ini maka semakin baik kemampuan pendapatan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerahnya, termasuk belanja daerah yang nantinya akan mendatangkan manfaat jangka panjang yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Semakin tinggi nilai dari *budgetary solvency ratio* maka semakin rendah kemungkinan terjadinya *financial distress* pemerintah daerah. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : *Budgetary Solvency Ratio* berpengaruh terhadap prediksi *financial distress* pemerintah daerah.

2.4.4 Hubungan *Financial Flexibility Ratio* terhadap prediksi *Financial Distress*

Ritonga et al. (2012:19) menyatakan bahwa rasio ini dapat mengukur kemampuan pemerintah dalam meningkatkan sumber daya keuangannya dalam menanggapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan maupun peningkatan kapasitas utang. Semakin tinggi nilai dari rasio ini maka semakin tinggi tingkat fleksibilitas keuangan pemerintah daerah tersebut. Hal ini berarti

bahwa pemerintah daerah tersebut akan lebih mampu untuk menghadapi berbagai hal di masa mendatang, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal salah satunya adalah terjadinya *financial distress*. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : *Financial Flexibility Ratio* berpengaruh terhadap prediksi *financial distress* pemerintah daerah.

2.4.5 Hubungan *Financial Independence Ratio* terhadap prediksi *Financial Distress*

Ritonga et al. (2012) mengatakan bahwa *financial independence ratio* merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk tidak membutuhkan sumber dana, kontrol, atau pengaruh dari luar baik dari sumber nasional maupun internasional. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan proporsi pendapatan asli daerah dari keseluruhan total pendapatan, sehingga semakin besar pendapatan asli daerah dari pemerintah daerah yang akan berpengaruh terhadap total pendapatan daerah tersebut. Total pendapatan daerah yang tinggi dapat berdampak pada kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga potensi untuk mengalami *financial distress* juga semakin kecil.

Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : *Financial Independence Ratio* berpengaruh terhadap prediksi *financial distress* pemerintah daerah.